



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

POHON KINERJA DISPERINDAG SULTENG TAHUN 2021-2026

POHON KINERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kinerja Strategis Daerah

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah
IK : Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja Urusan/ Sub Urusan

Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan
IK : Kontribusi PDRB sektor perdagangan

Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan

IK : Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

IK : Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)

IK : Inflasi pangan bergejolak (%)

Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan
IK : Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas

Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas

IK : Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)

IK : Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)

IK : Cakupan bina pelaku IKM (persen)

Kinerja Taktikal

Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
IK 1 : Persentase rekomendasi SIUP B2/MB-Gol.B /MB Gol. C
IK 2 : Persentase penerbitan SKA

Terlaksananya Sarana Distribusi Perdagangan
IK : Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi

Tercapainya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
IK : Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok

Terlaksananya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
IK : Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi

Terwujudnya Pengembangan Ekspor
IK : Nilai ekspor

Terlaksananya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
IK1 : Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen
IK2 : Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi

Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri
IK1 : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
IK 2 : Persentase Layanan IKM

Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri
IK : Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis

Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
IK : Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas

Kinerja Operasional Perdagangan



Kinerja Operasional Perindustrian

Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri

IK1 : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam

RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

IK 2 : Persentase Layanan IKM

Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

IK 1 : Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

IK 2 : Jumlah layanan bagi Pelaku IKM

Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi

IK : jumlah dokumen rencana pembangunan industri

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

IK : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

IK : Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

IK : Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Terlaksananya Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

IK : jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri

Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri

IK : Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis

Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

IK : Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

IK : Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi:

- 1) Industri Besar; dan
- 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas kabupaten/kota,
- 3) kawasan industri, dan perizinan perluasan kawasan industri yang merupakan PMDN yang berlokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi

IK : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

IK : Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas

Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

IK : Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Terlaksananya Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

IK : Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Terlaksananya Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas

IK : Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

IK : Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

CASCADING DISPERINDAG SULTENG TAHUN 2021-2026

VISI & MISI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021 - 2026

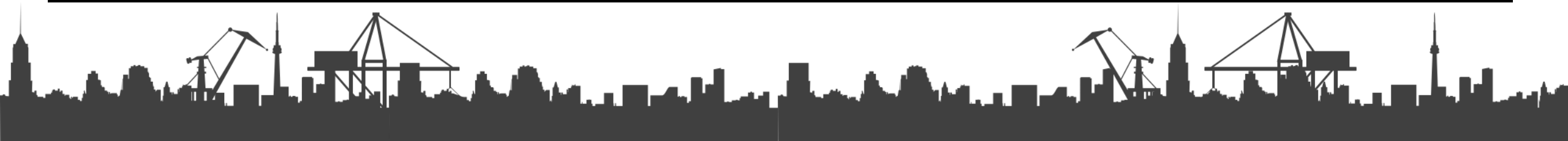
VISI

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi
Tengah
Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”



MISI

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
- 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.**
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.



MISI 3:

Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan

TUJUAN
1

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH

INDIKATOR
TUJUAN

PERTUMBUHAN EKONOMI

SASARAN
STRATEGIS

- MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH
- MENINGKATNYA PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
- MENINGKATNYA NILAI REALISASI INVESTASI
- MENINGKATNYA PENDAPATAN DAN DAYA SAING DAERAH
- MENINGKATNYA PERAN KOPERASI DAN UMKM MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

- PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH
- PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
- NILAI REALISASI INVESTASI
- PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN
- INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)
- KONTRIBUSI SEKTOR KOPERASI TERHADAP PDRB
- KONTRIBUSI SEKTOR UKM TERHADAP PDRB

URUSAN

PERTANIAN

PERIKANAN

PARIWISATA

PERDAGANGAN

PERINDUSTRIAN

PENANAMAN MODAL

PENDAPATAN

PENELITIAN & PENGEMBANGAN

KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG; PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN; PERHUBUNGAN; KEUANGAN; ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL; PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Misi 3

Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan

Tujuan 3.1 RPJMD

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

Indikator Tujuan 3.1 RPJMD

Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran Strategis RPJMD

Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah

Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan

Indikator Sasaran Strategis RPJMD

Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Daerah

Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Daerah

Tujuan DISPERINDAG

Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan

Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Indikator Tujuan DISPERINDAG

Kontribusi PDRB sektor perdagangan

Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas







ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan			
Indikator ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C (%)		Persentase penerbitan SKA (%)	
Kegiatan DISPERINDAG	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
Indikator Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA
Sub Kegiatan DISPERINDAG	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
Indikator Sub Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemenuhan komitmen pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya pedagang besar/distributor bahan berbahaya sebagai lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Jumlah laporan pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal

ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
Indikator ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi (%)	
Kegiatan DISPERINDAG	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
Indikator Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
Sub Kegiatan DISPERINDAG	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
Indikator Sub Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah laporan penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah pengguna pasar lelang komoditas yang berpartisipasi

Program Sasaran Strategis DISPERINDAG	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					
Indikator Program Sasaran Strategis DISPERINDAG	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok					
Kegiatan DISPERINDAG	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		
Indikator Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag		Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi		
Sub Kegiatan DISPERINDAG	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
Indikator Sub Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida

ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Pengembangan Ekspor			
Indikator ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Nilai ekspor			
Kegiatan DISPERINDAG	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			
Indikator Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			
Sub Kegiatan DISPERINDAG	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Pameran Dagang Lokal	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
Indikator Sub Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina

ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen									
Indikator ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen					Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi				
Kegiatan DISPERINDAG	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen			Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan			Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kinerja PSMB	
Sub Kegiatan DISPERINDAG	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Verifikasi Mutu Produk	Pengembang an Layanan Pengujian	Pengemban gan Layanan Sertifikasi	Pengembang an Layanan Kalibrasi	
Indikator Sub Kegiatan DISPERINDAG	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	Jumlah Kasus yang ditangani	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Jumlah sertifikat produk yang diterbitkan	Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan	



ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Perencanaan dan Pembangunan Industri					
Indikator ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP					
	Persentase Layanan IKM					
Kegiatan DISPERINDAG	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					
Indikator Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					
	Jumlah layanan bagi Pelaku IKM					
Sub Kegiatan DISPERINDAG	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Indikator Sub Kegiatan DISPERINDAG	jumlah dokumen rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri

ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Pengendalian Izin Usaha Industri	
Indikator ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis	
Kegiatan DISPERINDAG	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
Indikator Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
Sub Kegiatan DISPERINDAG	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi
Indikator Sub Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas kabupaten/kota, 3) kawasan industri, dan perizinan perluasan kawasan industri yang merupakan PMDN yang berlokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Kewenangan Provinsi

